

Perbandingan Sistem, Strategi dan Berbeda Manufaktur yang Dikembangkan PTKI dengan Multikultural

Seten Hartedi¹, Alfauzan Amin²

¹STIT Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan, ²UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹setenhartedi2017@gmail.com

²alfauzanamin@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract

The context of pluralism, multiculturalism, multiethnicity and religion in Indonesian society is very important. Therefore, serious attention is needed from various parties, so that unity and togetherness are not divided. Although the above problems have subsided, it does not mean that the problems have resolved themselves, because in many cases the implementation of Article 13A of the Education Law at the administrative level does not run as it should. Basically, this provision has three specific objectives: 1) Avoiding deviations from religious norms or misinterpretations that may arise if teachers are taught by teachers who do not share the same faith; 2) If teachers have the same beliefs as students, then religious harmony can be better maintained between other students; and 3) Professionalism in organizing religious training and education. The application of religion in multicultural education in the world of education can be a solution to disputes in society. In comparative research, several approaches can be used to compare groups, such as experiments, case studies, or secondary data analysis. This research focuses on analyzing the differences or relationships between the variables studied in two or more different groups or situations. The objective can be modified to understand the influence of a variable on different groups, to identify factors that influence differences and similarities between groups in order to compare the effectiveness of two or more strategies and differences in manufacturing in developing PTKI with multiculturalism.

Keywords: Manufacturing PTKI development; multicultural;

How to cite this article:

Hartedi, S., Amin, A., Zubaedi, Ismail. (2024). Perbandingan Sistem, Strategi dan Berbeda Manufaktur yang Dikembangkan PTKI dengan Multikultural. *Al-Bahtsu: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(1), 146-155.

Received: 1/12/2024

Revised: 4/11/2024

Accepted: 5/1/2024

PENDAHULUAN

Belakangan ini gagasan multikulturalisme ramai di perdebatkan dan diperbincangkan dalam konteks kehidupan sosial, politik dan budaya yang terus merambah di Indonesia ke ruang publik bahkan domestik. Pengembangan pemikiran ini sejalan dan semakin meningkat penyampaian pendapat dalam demokrasi di masyarakat sipil dalam beberapa tahun terakhir (Amirudin, 2018).

Pluralisme, inklusi dan toleransi dalam kehidupan multikultural mulai mendapat perhatian dari pihak intelektual di kalangan ahli pendidikan. Saat ini semakin sulit menemukan bangsa yang memiliki kebudayaan yang bersatu atau homogen. Buktinya, masyarakat Indonesia kini menjadi contoh sempurna dari fenomena tersebut, sehingga Indonesia bisa disebut sebagai karikatur masyarakat multikultural yang sedang berkembang.

Pluralisme muncul karena berbagai sebab, seperti kolonialisme atau munculnya negara dari berbagai suku antar negara. Rasa ingin tahu manusia yang kuat secara psikologis memotivasi manusia untuk belajar banyak tentang kondisi di luar Negara komunitas (A. A. Ngurah Anom Kumbara, 2023). Dan ketika Anda mengalami kondisi kehidupan di luar komunitas Anda sendiri dan belajar tentang kehidupan komunitas lain, hal ini akan mengarah pada saling pengertian dan kerja sama, membantu orang lain disebut studi banding.

Defensi dasar dari penelitian komparatif dirancang untuk menganalisis dua subjek atau lebih untuk menemukan persamaan dan perbedaan guna memperoleh wawasan tentang berbagai sistem, strategi, dan model pendidikan di Indonesia, khususnya lembaga keagamaan Islam. Sekolah dengan latar belakang sejarah yang relatif berbeda (PTKI). Dalam penelitiannya, Melkias Antonius penerapan dalam pendidikan multikultural di dunia dapat menyelesaikan permasalahan dan perpecahan di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya istilah lain, pendidikan multikultural merupakan alat penyelesaian masalah di dalam kehidupan sosial. Pendidikan multikultural menjadi salah satu penyelesaian permasalahan yang harus dikembangkan sedemikian rupa agar peserta didik tidak lepas dari akar budaya sebelumnya dengan latar belakang realita kehidupan sosial kebudayaan yang bersifat global. Penerapan pendidikan multicultural menjadi dasar pengembangan kurikulum nasional pada kegiatan pembelajaran, yaitu muatan pendidikan tingkat tertentu (Nasional & Palembang, 2018). Pendidikan sangatlah penting. Cara ini, pembelajaran multikultural dapat dijadikan secara komprehensif pada setiap pelajaran. Meski belum menjadi mata pelajaran mandiri dalam kurikulum nasional, namun harus diintegrasikan ke dalam mata pelajaran kewarganegaraan dan agama (Riyanti & Novitasari, 2021).

Dalam penerapannya di perguruan tinggi, pendidikan multikultural di perguruan tinggi merupakan suatu yang memiliki variabel yang sangat erat hubungannya. Memikirkan pendidikan sesuatu yang memerlukan penciptaan rencana strategis untuk mengubah lingkungan pendidikan tinggi menjadi pendidikan multikultural sepenuhnya (Nawangsih & Daheri, 2022). Kurikulum tersebut merupakan salah satu variabel yang perlu diperhatikan dalam standar pendidikan.

Lingkungan pendidikan memiliki beberapa aspek yang merupakan persoalan yang harus diubah sesuai dengan tujuan pendidikan multikulturalisme untuk menciptakan kebudayaan yang lebih mengedepankan dan mengubah paradigma yang ada pada civitas akademika (Prasetiawati, 2017). Pendidikan multikultural memiliki beberapa peran, yaitu: 1) memajukan masyarakat yang bersahabat 2) melaksanakan tugas sebagai alternatif penyelesaian konflik 3) Pengayaan nilai-nilai budaya kearifan lokal 4) Mengembangkan kepribadian dan pengetahuan untuk memperkuat akar kebudayaan 5) Menghormati nilai-nilai budaya dalam pengembangan kurikulum di tingkat nasional dan daerah. 6) menumbuhkan manusia damai dalam masyarakat Indonesia yang mengedepankan rasa memiliki terhadap keberagaman. 7) Mengetahui dan mendefinisikan pengetahuan. 8) Dalam pemahaman terhadap epistemologi terhadap permasalahan meskipun bagian penting pengembangan pengetahuan yang diperlukan bagi peradaban manusia modern. 9) Dalam menuntut peran ideologi Pancasila sebagai penguatan sistem pendidikan nasional.

METODE

Membandingkan berbagai sistem, strategi dan model pembangunan PTKI dalam perspektif multikultural dengan menggunakan metode komparatif merupakan penelitian dengan tujuan untuk membandingkan dua atau lebih variabel untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan keduanya. Fokus penelitian ini pada analisa persamaan dan perbedaan dalam hubungan antar variabel yang diteliti. Pada penelitian komparatif ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk membandingkan kelompok eksperimen, studi kasus dan analisis data sekunder (Pahleviannur et al., 2022).

Tujuannya bisa berbeda-beda untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan dan persamaan antar variabel, untuk membandingkan efektivitas strategidalam penelitian. Dalam studi dengan metode komparatif membandingkan kinerja siswa yang menerima metode pengajaran berbeda dalam bidang studi banding untuk memperdalam pemahamannya terhadap berbagai fenomena dan membuka peluang membuat kebijakan yang lebih baik berdasarkan pemahaman perbedaan dan persamaan dalam keberagaman di masyarakat (Jamil et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perguruan tinggi Islam terdiri atas tiga jenis: Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Keagamaan Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPOT) (Buton, 2022). Perguruan tinggi Islam swasta dijalankan oleh yayasan dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Waktu khutbah pembukaan tertera dalam Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI). Sebelumnya Kemenristekdikti bertanggung jawab atas regulasi dan kebijakan, melalui PP ini Kemenag berwenang melakukan penambahan agar khutbah PTKI tetap terjaga dan tertata dengan baik.

Hal tersebut ditegaskan dengan pasal-pasal khittah PP. Poin 1 aturan umum PTKI menyatakan “Perguruan tinggi diselenggarakan untuk pengkajian dan pengembangan ilmu agama dan berbagai mata pelajaran.” Sesuai Pasal 12, PTKI hanya dapat menyelenggarakan pelatihan vokasi keagamaan. Padahal, menurut Pasal 17, jumlah kurikulum non keagamaan PTKI tidak boleh lebih banyak dibandingkan jumlah pendidikan

agama. Pada dasarnya misi PTKI adalah mencetak ulama-ulama Islam, baik ulama yang menguasai keistimewaan Islam maupun ulama yang menguasai disiplin ilmu lain (Zaim, 2021).

Dengan pemahaman seperti itu, maka tren dan perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ke depan setidaknya akan lebih terfokus pada dua (dua) topik utama. 1) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus mampu menghasilkan lulusan yang mutafaqqih fiddin di bidang Islam. Program pendidikan agama IAIN dan UIN hendaknya ditujukan langsung kepada lulusan untuk memperoleh keterampilan tersebut. Selain itu juga merupakan bagian integral dari produksi fidi mutafaqqih ini dalam bentuk perguruan tinggi agama Islam (Iain, 2017). Kedua, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus mencetak ulama-ulama lain seperti humanismedan sebagainya.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tidak bermaksud menghasilkan tenaga professional di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, humaniora dan bidang lainnya yang tidak memahami Islam. Pengetahuan Islam dan disiplin ilmu lainnya merupakan satu kesatuan. Kurikulum IAIN dan UIN yang secara institusional non-religius harus berbasis prestasi. Kualifikasi ini diperlukan sebagai bagian dari diferensiasi kurikulum non-agama (proses, metode, tindakan diferensiasi: memisahkan hak dan kewajiban atau proses anggota masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin dan pekerjaan) (Yusuf, 2018).

Di PTKI dan di luar PTKI. Jika dimaknai, program pendidikan non-agama PTKI melahirkan ulama-ulama Islam. Selain ilmu keislaman, mereka juga menguasai bidang ilmu umum lainnya (Khoiriyah, 2021). Perwujudan kedua kecenderungan tersebut, selain pendidikan PTKI, juga memerlukan perhatian yang cermat. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus berani tidak menerima calon mahasiswa yang tidak memiliki ilmu pengetahuan keislaman yang baik.

Pengembangan multikultural di perguruan tinggi dan implementasi multikultural di perguruan tinggi dalam muatan kurikulum, seperti kewarganegaraan, multikulturalisme dan agama serta melalui kurikulum. atau bisa juga dipengaruhi oleh kurikulum. kaitannya dengan kurikulum. memajukan akhlak mulia, secara intensif. Pendidikan multikultural dapat dirujukan pada universitas di berbagai jurusan. Meskipun perguruan tinggi merupakan beberapa mata kuliah. Secara kontekstual, kurikulum merupakan alat pembelajaran yang memenuhi kedudukan yang sebenarnya dalam pembelajaran. Jika kurikulum dianggap sebagai jantungnya pengajaran, maka kurikulum harus ditempatkan pada tempat yang tepat (Kristiawan, 2019).

Dalam memperhatikan bidang dan mencermati ciri-ciri yang harus ada di masyarakat agar dapat dan melibatkan berbagai aspek pengembangan pendidikan dalam mencakup komponen-komponen; isi evaluasi, proses dan tujuan serta kurikulum dimensi proses merupakan penerapan dari dimensi dokumen dan kurikulum mengukur hasil belajar siswa/peserta didik. Untuk menjelaskan kondisi dan fenomena keberagaman Indonesia maka dikembangkan sebagai pedoman memperkuat identitas nasional. Perguruan tinggi menyelenggarakan kursus kewarganegaraan di berbagai wilayah untuk bangsa Indonesia khususnya generasi muda (Setiarsih, 2016).

Pendidikan multikultural merupakan penanaman nilai-nilai dalam pendidikan kepada peserta didik dalam menghadapi kehidupan di masa depan, mereka memiliki konsep

multikultural berbagai jalur budaya, agama, ras dan bahasa dalam menghargai perbedaan dan tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan (Adya Winata, 2020). Mayoritas atau etnis minoritas dapat bersinergi untuk menciptakan kekuatan nasional yang memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kuat dan dapat dipercaya di kancah global. Keberagaman dapat mempengaruhi guru menyampaikan pembelajaran dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa untuk mengolah, meneliti, dan hasil pembelajaran.

Keberagaman tersebut merupakan variabel independen yang mempunyai peran penting dalam proses pendidikan yang dihasilkan (Ananda, 2019). Pendekatan multikultural dalam pengembangan hendaknya didasarkan pada empat prinsip; a) Keanekaragaman dasar budaya menjadi pemahaman. (b) Keragaman dasar budaya dijadikan pengembangan komponen kurikulum, seperti isi dan penilaian. (c) Budaya di lingkungan satuan pendidikan merupakan sumber belajar dan objek belajar yang wajib diikutsertakan dalam kegiatan pembelajaran. d) Kurikulum merupakan sarana pengembangan kebudayaan daerah dan nasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut dari sudut pandang ini, cetak biru yang membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan sosial di masa dewasa. Yang menjadi landasan dalam pelaksanaan multikulturalisme di perguruan tinggi adalah pendidikan kewarganegaraan, multikulturalisme dan agama serta dapat dilaksanakan secara rahasia (Sangadji, 2016). kurikulum atau penawaran dengan pendidikan akhlak mulia yang intensitasnya mendorong berkembangnya umat beragama yang rukun.

Dilaksanakan melalui penelitian diikuti dengan pengembangan norma agama, norma hukum, norma etika, dan norma sosial. Pendidikan multikultural harus dilaksanakan secara holistik, mulai dari penyusunan dan perencanaan kurikulum hingga proses analisis sesuai dengan kebutuhan, pengayaan dan penguatan berbagai ilmu pengetahuan khusus, perencanaan dapat membentuk peserta didik untuk yang memiliki kesadaran dan peduli terhadap sesama (Muslimin, 2023). yang lain tanpa. mengorbankan hak orang lain. yang lain. Kedua. Diskriminasi antara ras, kepercayaan, bahasa, budaya, prestasi multikultural diukur penilaian sesuai, baik observasi, catatan harian, penilaian sumatif atau penilaian mandiri portofolio yang berkesinambungan.

Keterampilan yang paling penting untuk dikembangkan dalam pendidikan multikultural adalah: 1. Menjadi warga negara yang menerima dan menghormati perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya masyarakat 2. Menjadi warga negara yang mampu menciptakan kerjasama multikultural, multikultural, dan keagamaan antara budaya, agama, dan kebangsaan masyarakat. pembangunan ekonomi dan kekuatan nasional; 3. Menjadi warga negara yang dapat menghormati hak setiap warga negara tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahasa, dan budaya dalam segala bidang sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan lainnya, bahkan dapat mempertahankan bahasanya sendiri dan mengembangkan budayanya sendiri. 4. Menjadi warga negara memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk menyampaikan pikiran dan keinginannya baik di lembaga formal maupun nonformal. 5. Dapat merasakan keadilan dan keselarasan bagi seluruh masyarakat apapun latar belakangnya baik agama, suku, ras dan budaya (Akhmadi, 2019).

Keterampilan inilah yang menjadi inti dari pendidikan multikultural, yang darinya kita mengharapkan multikultural dapat mampu bersikap kuat demi kebaikan serta belas kasih dan adil terhadap warga negara, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, ras, bahasa atau kulit.

Berdasarkan pengertian tersebut, John Dewey mengatakan ada tiga hal yang harus diperhatikan ketika merancang kurikulum. Pertama, sifat dan kebutuhan peserta didik. Kedua, sifat dan kebutuhan masyarakat. Dan ketiga, permasalahan terbesar yang dihadapi siswa adalah menjadi individu dewasa yang mampu berinteraksi dengan orang lain yang hidup di masyarakat. sebagai program pembangunan dan kebudayaan yang mampu memberikan pengaruh dalam multikultural. Pada prinsipnya, multikultural di universitas tersendiri, yang harus diterjemahkan ke dalam beberapa mata kuliah tersendiri, seperti Pengantar Pendidikan Multikultural, Landasan Pendidikan Multikultural, dan Studi Keagamaan (Pala et al., 2020). Keberadaan Pancasila untuk mendukung atas nama Republik Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”.

Untuk lebih memahami konsep pendidikan, lihat pengertian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: Pendidikan merupakan suatu sistem pendidikan, lingkungan belajar dan belajar dimana siswa dapat secara aktif mengembangkan potensinya. Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi sebagai berikut: a. Visinya adalah agar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi tumbuh sebagai; sumber nilai-nilai dan pedoman pengembangan dan pelaksanaan program studi agar dapat mengembangkan kepribadiannya didasarkan kenyataan yang dihadapi bahwa mahasiswa merupakan generasi yang cerdas, religius, beradab, berwawasan kemanusiaan serta cinta tanah air dan bangsa. b. Misi pendidikan kewarganegaraan universitas adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar senantiasa dapat menerapkan nilai-nilai inti Pancasila, nasionalisme, dan patriotisme dalam perwujudan, penerapan, dan pengembangan moralitas. Kualifikasi diasumsikan merupakan lulusan berjiwa dan beradab. Peserta didik dituntut untuk hidup damai sesuai sistem nilai Pancasila agar menjadi warga negara yang kompetitif, disiplin, dan berperan aktif (Rizky Salsabila et al., 2021).

Pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi mencakup topik-topik sebagai berikut: a) Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kualifikasi penuh atau keterampilan profesional. b) Hakikat dan pentingnya jati diri bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor penentu pembentukan suatu bangsa dan karakternya. c) Demi persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, integrasi nasional sangatlah mendesak untuk diwujudkan. d) Nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar dalam konteks kehidupan berbangsa Indonesia. e) Kerasian tugas dan hak negara dan warga negara dalam negara Cara hidup demokratis di Indonesia didasarkan pada hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri dan untuk memperoleh mufakat. f) Hakikat, sumber daya dan pengamalan demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan

yang sejahtera dan berkeadilan. g) Dinamika sejarah ketatanegaraan modern, kebijakan sosial, budaya dan penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. h) Dinamika sejarah dan signifikansi Wawasan Nusantara sebagai pemahaman dan visi kolektif kewarganegaraan Indonesia dalam konteks hubungan dunia. i) Urgensi ketahanan nasional Indonesia dan tantangan pembangunannya dilandasi oleh komitmen bersama elemen mencapai kemandirian, penguatan karakter, sudut pandang, antara lain akademis, hukum, dan politik (Pahlevi, 2017).

Akademis Visi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hendaknya membangun kemanusiaan Pancasila yang memiliki dimensi kemanusiaan berlanjut dalam perjalanannya kerap menghadapi permasalahan sosial penuh kekerasan dapat berujung pada hilangnya keutuhan dan keadaan menjadi terpecah belah (Sholeh et al., 2016). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan demi keberlangsungan dan kehormatan bangsa Indonesia yang berkarakter berdasarkan Pancasila.

Hukum keberadaan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi secara hukum didasarkan pada norma hukum sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–kurang lebih tahun 2014, Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Umum Republik Indonesia. Sertifikat Penyelenggaraan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Politik secara akademis, yaitu ilmu politik pendidikan kewarganegaraan tidak dipengaruhi dari pihak internal dan eksternal yang dapat merusak karakter bangsa (Zulfikar & Dewi, 2021). Karena itu, akar memperkuat pendidikan nasional peserta didik. Mereka akan menduduki posisi kepemimpinan di masa depan. Secara paradigma, persinggungan diartikan satuan dasar yang menjadi sumber acuan seluruh mata pelajaran yang ditetapkan dan tidak terpisahkan dalam kehidupan pemerintahan.

Tren penyelenggaraan ini membawa seluruh pendidik dalam peningkatan pendidikan kewarganegaraan keseluruhan menghadirkan dan juga berdampak pada peningkatan kompetensi, keahlian, kompetensi dan efisiensi secara berkelanjutan. guru kewarganegaraan. Pendidik harus memahami motivasi, isi dan evaluasi warga. Pendidikan kewarganegaraan memerlukan pemikiran, sikap dan tindakan dengan kompetensi, kepercayaan diri, tanggung jawab. Pembentukan universitas membawa tantangan dan juga berdampak pada kelanjutan pendidikan serta rekrutmen guru Pancasila dan warga negara. Dosen harus mempunyai latar belakang dan isi serta evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif.

Penguatan keterampilan profesional guru juga memerlukan perubahan pemikiran, sikap dan tindakan terkait kompetensi kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, kompetensi kewarganegaraan, rasa percaya diri sebagai warga negara, tindakan kewarganegaraan dan kompetensi kewarganegaraan yang diperlukan, serta budaya profesional guru. untuk staf pengajar. Penciptaan dua mata kuliah wajib perguruan tinggi merupakan sebuah tantangan dan akan selalu berdampak pada pembaharuan dan rekrutmen guru pendidikan Pancasila dan warga negara. Penguatan keterampilan

profesional guru juga memerlukan perubahan pemikiran, sikap dan model tindakan yang mengacu pada tekad guru (Yuni, 2017).

Untuk memperkuat nilai-nilai multikultural bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan, kita dapat mencermati yang dituangkan dalam multikultural, yaitu: a) berbasis perilaku keagamaan tentang upaya untuk menjadi pribadi yang selalu dapat dipercaya melalui perkataan, tindakan dan karya. b) Kejujuran, perilaku yang dilandasi oleh upaya untuk menjadi pribadi yang selalu dapat dipercaya melalui perkataan, tindakan, dan pekerjaan. (c) toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai orang lain tanpa memandang agama, latar belakang suku, pendapat, sikap dan tindakannya. d) Disiplin, bukti perilaku yang baik dan kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan. e) Berpikir, berperilaku demokratis yang menghormati tanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama.

KESIMPULAN

Sistem, strategi dan model pembangunan multikultural Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berbeda dengan gagasan yang mengedepankan kesadaran kolektif untuk menjaga keberagaman di NKRI (Sumartini, 2021). Salah satu titik awal untuk menjaga keberagaman adalah pendidikan tinggi, Dimana Indonesia memiliki Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang mempunyai peran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perbandingan system dan model pengembangan multikultural di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam diterapkan di seluruh kurikulum universitas, misalnya dengan membuat mata kuliah pendidikan agama Islam multikultural Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Pelatihan kewarganegaraan biasanya diselenggarakan di setiap perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Jadi dalam hal ini Perguruan Tinggi Keagamaan Islam secara umum berlandaskan Islam yang berlandaskan pada ajaran Islam dalam mengembangkan nilai-nilai multikulturalnya (Abdu et al., 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Ngurah Anom Kumbara. (2023). Paradigma & Teori-Teori Studi Budaya. In Paradigma & Teori-Teori Studi Budaya. <https://doi.org/10.55981/brin.529>
- Abdu, M., M, S., & Putra, D. R. (2022). Pelaksanaan Program Pendidikan Multikultural Pada Ma'had Al- Jami'ah PTKIN (Studi Evaluasi Pada IAIN Curup). *Jurnal Studi Islam, Sosial Dan Pendidikan*, 1(3), 1–14. <https://ejournal-insancendekia.com/index.php>
- Adya Winata, K. (2020). Implementasi Pendidikan Multikultural di Era Revolusi 4.0. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 1(2), 118–129. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v1i2.9>
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Amirudin. (2018). *Jurnalisme Multikultural: Gagasan Mengembangkan*. Ilmiah Kajian Antropologi, 1(2), 94–103.
- Ananda, R. (2019). Dr. Rusydi Ananda, M.Pd.
- Buton, M. (2022). Perkembangan Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia. 2(1), 24–35.

- lain, K. I. (2017). Konversi institusional iain menuju uin alauddin makassar menurut perspektif azhar arsyad. 3, 179–200.
- Jamil, M., Muhardinata, I., Ishaq, Faza, A. M., Caniago, A. S., Pinem, R. K. B., Nasution, A., Nasution, M., Asyura, Akbar, A., Sibuea, M. Z., Lubis, S., Rangkuti, A., Syafaruddin, Sani, H., & Anizar. (2017). Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika. 1–321. http://repository.uinsu.ac.id/6278/1/10_Fikih_Kontemporer_%28Sebuah_Dialektika%29_Final.pdf
- Khoiriyah, B. (2021). Model Integrasi Keilmuan Pesantren Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Di Indonesia. Tesis, 1–225. https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/16/%0Ahttps://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/16/1/2021-Binti_Khoiriyah-2016.pdf
- Kristiawan, M. (2019). Analisis Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. In UPP FKIP Univ. Bengkulu (Issue February).
- Muslimin, I. (2023). 8.+Ikhwanul+Muslimin_23+hal+(108-130). 5(1), 108–130.
- Nasional, P. S., & Palembang, U. P. (2018). No Title. 285–291.
- Nawangsih, E., & Daheri, M. (2022). Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi. 4(4), 5727–5733.
- Pahlevi, F. S. (2017). Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dalam Memperkokoh karakter Bangsa Indonesia. *Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 2(1), 65–82. <https://doi.org/10.21154/ibriez.v2i1.26>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Saputra, D. N. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Pradina Pustaka.
- Pala, S., Rahman, H., & Kadir, M. (2020). Konsep Pendidikan Multikultural. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 2(1), 78–87. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v2i1.370>
- Prasetiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultur untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 272. <https://doi.org/10.32332/tapis.v1i02.876>
- Riyanti, A., & Novitasari, N. (2021). Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal Bagi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 3(1), 29–35. <https://doi.org/10.23887/jabi.v3i1.37780>
- Rizky Salsabila, S., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Peranan Perilaku Cinta Tanah Air melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7791–7800.
- Sangadji, K. (2016). Pendidikan Multikultural Dalam Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi (Sebuah Kajian Kurikulum). *Biosel: Biology Science and Education*, 5(1), 38. <https://doi.org/10.33477/bs.v5i1.483>
- Setiarsih, A. (2016). Penguatan Identitas Nasional Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal. Seminar Nasional PGSD Universitas PGRI Yogyakarta.
- Sholeh, M., Yunus, N. R., & Susilowati, I. (2016). Resolusi Konflik Pencegahan Disintegrasi Bangsa Melalui Legalitas Hukum Syariat di Aceh. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(2), 217–230. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i3.7862>

- Sumartini, N. W. E. (2021). Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, No. 1 Tahun 2021 40. Penyuluhan Hukum Di Era Digital, 1, 135.
- Yuni, Q. F. (2017). Pengembangan Soft Skill Untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Elementary*, 5(1), 192–212.
- Yusuf, M. (2018). Pengantar Ilmu Pendidikan. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 126.
- Zaim, M. (2021). Di Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. *Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi Dan Hubungan Internasional*, 4(1), 13–29.
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104–115. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1171>